



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)**

TRIWULAN I

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PALANGKA RAYA, APRIL 2025

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pra syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Guna memenuhi hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta kepada masyarakat/publik.

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025. dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah ini kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palangka Raya, April 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Dr. M. KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661022 199308 1 001

BAB I

KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, Badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada masukan, keluaran, dan hasil.

Dari pengukuran kinerja akan dapat dilakukan penilaian proses penyusunan Kebijakan/ Program/Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Adapun Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan I Tahun 2025.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui capaian kinerja yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Rumus yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pengukuran Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

1. Sasaran Strategis pertama : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Politik.

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka). Pencapaiannya diketahui setelah ada penilaian pada tahun berikutnya. Upaya pencapaian IKU tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya dengan melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik.

2. Sasaran strategis kedua : Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM yang terlibat dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Pada Triwulan I, Badan Kesbangpol Prov. Kalteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ormas sebagai Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ormas bersama Forkopimda dan OPD terkait, bertempat di Rahan Pumpung Hapakat Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BINDA Kalteng, perwakilan Korem Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan dari Kejati Kalimantan Tengah dan ASN Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa hal yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut antara lain :

- a. Pengawasan terhadap Ormas harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Setiap kegiatan Ormas harus sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak bertentangan dengan hukum, dan mendukung stabilitas sosial.
- b. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berbentuk pengawasan administratif, tetapi juga meliputi aspek substansi, sehingga kegiatan Ormas benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- c. Selain pembinaan dan pengawasan, perlunya dilakukan penyuluhan dan edukasi kepada Ormas agar mereka memahami peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Ormas harus berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih maju, adil, dan Sejahtera.

3. Sasaran Strategis ketiga : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa.

Sasaran ini dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang). IKU tersebut diterjemahkan pelaksanaannya melalui program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

4. Sasaran Strategis keempat : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD.

Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu Potensi Terjadinya Konflik Terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentasi Kasus yang telah Ditangani). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

5. Sasaran Strategis Kelima : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, dari segi pencapaian kinerja yang akan dicapai, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai jadwal, namun ada beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan, sehingga kegiatan yang dijadwalkan dilaksanakan pada triwulan I Tahun Anggaran 2025 belum dapat dilaksanakan,
- b. Nilai skor Indeks Demokrasi Indonesia masih belum *direlease* hingga saat laporan ini dibuat, sehingga belum dapat dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan 1 Tahun 2025 ini,
- c. Data tindak lanjut penanganan potensi konflik hingga Triwulan I Tahun 2025 masih dalam proses pendataan dan penyusunan,
- d. Untuk Kegiatan rutin kantor, realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Untuk mengatasi kendala yang terjadi selama Triwulan I Tahun Anggaran 2025, kegiatan yang belum dilaksanakan akan mulai dilaksanakan dengan menyesuaikan kembali kegiatan dengan anggaran kas setelah efisiensi anggaran.

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, untuk pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah masih diperlukan upaya lebih lanjut dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala agar target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun dapat tercapai.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025 disusun, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanat yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Lampiran : LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TW I TAHUN
2025

Nama PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

a. Laporan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Satuan	Capaian Triwulan IV			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	79	Nilai / Angka	79			
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	90	Persen	90			
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200	orang	200			
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	90	Persen	90			
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200	orang	200			

b. Laporan Keuangan Penunjang Kinerja

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			13.640.151.915	13.640.151.915	1.479.254.857	10,84	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			3.300.385.667	3.300.385.667	19.112.400	0,58	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		3.300.385.667	3.377.943.317	19.112.400	0,58	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70.000.000	70.000.000	3.691.000	5,27	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	358.000.000	358.000.000			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500000	500000			

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	148.800.000	148.800.000			
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	113.047.667	113.047.667	15.421.400	13,64	
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	141.070.000	141.070.000			
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	10.000.000	10.000.000			
			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	100.000.000	100.000.000			
			Pelaksanaan tugas Paskibraka	1.499.468.000	1.499.468.000			

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	10.000.000	10.000.000			
			Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	100.000.000	100.000.000			
			Pembentukan Paskibraka	250.000.000	250.000.000			
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			17.932.426.500	17.932.426.500	55.470.000	0,31	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		17.932.426.500	17.932.426.500	55.470.000	0,31	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140.062.000	140.062.000	25.020.000	17,86	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35.327.000	35.327.000			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	132.034.500	132.034.500			
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	17.427.196.000	17.427.196.000			

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	197.807.000	197.807.000	30.450.000	15,39	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			947.791.253,92	947.791.253,92	8.640.000	0,91	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		947.791.253,92	947.791.253,92	8.640.000	0,91	
			Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	97.600.000	97.600.000	8.640.000	8,85	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	140.000.000	140.000.000			

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	497.150.000	497.150.000			
			Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	113.041.253,92	113.041.253,92			
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	100.000.000			
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			9.437.596.901,73	9.437.596.901,73	19.004.850	0,20	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		9.437.596.901,73	9.437.596.901,73	19.004.850	0,20	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.050.000	90.050.000	8.280.000	9,19	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.800.000	90.800.000			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.656.830.901,73	8.656.830.901,73			
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	342.150.000	342.150.000	1.724.850	3,13	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	257.766.000	257.766.000			
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			1.742.560.578	1.742.560.578	10.724.850	0,62	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1.742.560.578	1.742.560.578	10.724.850	0,62	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70.000.000	70.000.000			

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	180.072.572	180.072.572			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	290.201.000	290.201.000			

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	512.819.100	512.819.100	10.724.850	2,09	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	325.533.000	325.533.000			
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	363.934.906	363.934.906			